

LAPORAN PENELITIAN
PENGARUH REFORMASI PERPAJAKAN INDONESIA
TERHADAP PENINGKATAN PENERIMAAN PEMERINTAH

DOKUMENTASI
UNIVERSITAS TERBUKA

Oleh :
I Nengah Baskara Wisnu Tedja

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TERBUKA
1991

80222

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|-------------------------------------|---------|
| PENDAHULUAN | 1 |
| Latar Belakang | 1 |
| Perumusan Masalah | 3 |
| Manfaat Penelitian | 3 |
| TUJUAN PENELITIAN | 4 |
| TINJAUAN PUSTAKA | 5 |
| LANDASAN TEORI | 9 |
| METODE PENELITIAN | 13 |
| Data yang digunakan | 13 |
| Variabel yang digunakan | 13 |
| Model persamaan | 14 |
| ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN | 16 |
| KESIMPULAN | 30 |
| LAMPIRAN | 32 |
| DAFTAR PUSTAKA | 41 |

LAPORAN AKHIR HASIL
PENELITIAN

1. a. Judul Penelitian : Pengaruh Reformasi Perpajakan Indonesia Terhadap Peningkatan Penerimaan Pemerintah
b. Macam Penelitian : Deskriptik analitik
c. Kategori Penelitian : Menunjang Modul Ekonomi Indonesia
-
2. Peneliti
a. Nama Lengkap : Drs I Nengah Baskara Wisnu Tedja
b. NIP : 131569962
c. Jenis Kelamin : Laki-laki
d. Pangkat/golongan : Penata Muda/III/a
e. Jabatan : Asisten Ahli Madya
f. Fakultas Jurusan : Ekonomi/IESP
g. Universitas : Universitas Terbuka
h. Bidang Ilmu yang diteliti : Ekonomi dan Studi Pembangunan
-
3. Jumlah Peneliti : 1 (satu) orang
-
4. Lokasi Peneliti : Universitas Terbuka.
-
5. Jangka Waktu Penelitian : Tiga (3) bulan
-
6. Biaya Penelitian : Rp. 350.000,-
-

Mengetahui:
Dekan Fakultas Ekonomi



Prof. Dr. Wan Usman, MA
NIP. 130178688

Jakarta, 11 Pebruari 1991
P e n e l i t i



Drs. I N Baskara W.T.
NIP. 131569962

Pendahuluan

A. Latar belakang

Pajak merupakan salah satu kebijaksanaan fiskal yang dianut pemerintah dimana tujuan umumnya adalah untuk stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi. Secara garis besar kebijaksanaan perpajakan di Indonesia sama dengan kebijaksanaan perpajakan di negara berkembang lainnya. Kebijakan itu adalah:

- (1) Meningkatkan laju investasi pemerintah maupun swasta. Pemerintah yang biasanya menangani investasi di sektor publik diharapkan dapat memberikan dampak yang positif bagi sektor swasta. Dengan sistem pajak tertentu dapat mendorong berdirinya perusahaan swasta dan memberikan rangsangan untuk mengembangkan perusahaan yang sudah ada.
- (2) Membantu dan mempertahankan stabilitas ekonomi dalam menghadapi gangguan internal maupun eksternal. Pajak ekspor yang rendah akan mendorong peningkatan ekspor sehingga dapat menambah devisa negara. Sebaliknya bea impor yang tinggi untuk barang mewah perlu dilakukan dalam rangka mengurangi daya beli tambahan.
- (3) Meningkatkan kesempatan kerja, dengan memberikan keringanan pajak tertentu dapat mendorong perusahaan swasta untuk berdiri sehingga dapat menyerap tenaga kerja.

(4) Menanggulangi inflasi, dimana pajak progresip yang dilengkapi dengan pajak komoditi merupakan salah satu alat yang efektif untuk mengurangi inflasi dalam perekonomian. Meskipun demikian struktur pajak harus ~~tidak~~ ~~terhadap~~ ~~investasi~~ ~~swasta~~.

(5) Sebagai alat untuk memperbaiki distribusi pendapatan yang tidak merata.

Di Indonesia hingga tahun 1983 keadaan perpajakan sangat lemah terutama dalam peraturan dan perundang-undangan karena masih menggunakan sistem dan peraturan dari jaman kolonial Belanda. Meskipun disana-sini terdapat perubahan, namun sifatnya belum menyeluruh. Dengan sistem lama ini jumlah wajib pajak sampai dengan bulan Desember 1983 hanya 435.517 orang dan tingkat kepatuhan membayar pajak juga rendah. Penerimaan pajak tahun 1983/1984 hanya Rp 4,4 trilyun.

Setelah berlakunya sistem perpajakan baru yang secara efektif dimulai tahun 1984, maka penerimaan pajak berangsur-angsur meningkat. Meskipun demikian berapa besar pengaruh dari berbagai macam reformasi perpajakan itu terhadap penerimaan negara dari pajak belum jelas benar misalnya bagaimana dampak perubahan pajak ekspor tahun 1980, pajak penghasilan 1984, pajak pertambahan nilai tahun 1985 dan tariff barrier 1985 terhadap penerimaan

negara.

B. Perumusan masalah

Secara khusus permasalahan yang ada dapat dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Bagaimana pengaruh PNB dan jenis-jenis pajak terhadap penerimaan negara.
- (2) Seberapa besar elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi dan terhadap reformasi pajak seperti pada butir (1).

C. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

- (1) Dapat dipakai sebagai masukan bagi para pengambil keputusan mengenai seberapa besar pengaruh reformasi perpajakan terhadap penerimaan negara.
- (2) Mengetahui seberapa besar potensi pajak dapat mengurangi pinjaman luar negeri untuk membiayai pembangunan Indonesia sehubungan dengan adanya reformasi pajak seperti pada butir 1.

Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah yang telah dirumuskan pada bab Pendahuluan maka tujuan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Menentukan pengaruh pertumbuhan ekonomi (GDPR) dan reformasi masing-masing jenis pajak terhadap penerimaan pemerintah dari:
 - (a) Pajak penghasilan perorangan
 - (b) Pajak penghasilan badan usaha
 - (c) Pajak pertambahan nilai
 - (d) Bea masuk
 - (e) Pajak bumi dan bangunan
 - (f) Pajak ekspor
 - (g) Pajak lainnya
 - (h) Penerimaan bukan pajak
- (2) Menentukan elastisitas penerimaan pajak terhadap GDPR dengan adanya berbagai macam reformasi perpajakan.

Tinjauan Pustaka

Landasan hukum bagi mulai berlakunya pemb... perpajakan 1984 didasarkan atas Undang-Undang perpajakan baru No. 6 tahun 1983 yang memuat ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan, Undang-Undang No. 8 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dari penjualan barang mewah, Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan dan Undang-Undang No. 13 1985 tentang bea materai.

Ciri khas dari sistem perpajakan yang baru adalah sebagai berikut:

- (1) Sederhana (dalam hal jumlah dan jenis pajak, tarif serta cara pemungutannya).
- (2) Mencerminkan asas pemerataan (dalam hal pengenaan dan pembebanan).
- (3) Adanya kepastian hukum (baik bagi wajib pajak maupun aparat hukum).
- (4) Berlakunya asas menghitung pajak sendiri atau self assessment (diberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memotong dan menyetorkan sendiri jumlah pajak yang menjadi kewajibannya).

Wajib pajak dibebaskan untuk menghitung sendiri pajaknya, namun Undang-Undang telah mengatur mekanisme pengawasannya dengan sanksi-sanksi yang cukup berat bagi

mereka yang melanggar.

Berbagai jenis pajak yang berlaku di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perpajakan yang baru adalah sebagai berikut

(1) Pajak Penghasilan

Pengaturan Pajak Penghasilan tertera didalam Undang-Undang No.7 tahun 1983; berlaku efektif 1 Januari 1984, yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak. Prinsip keadilan dan pemerataan dapat dilihat dari diterapkannya sistem pajak progresif dimana wajib pajak yang berpenghasilan tinggi akan membayar lebih banyak dari yang berpenghasilan rendah.

(2) Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan nilai adalah pajak yang dipungut dan disetor berdasarkan atas pertambahan nilai dari barang atau jasa yang diserahkan. Sebelum berlakunya pajak pertambahan nilai yang baru pajak penjualan dapat dikenakan berkali-kali dengan efek berganda sehingga konsumen membayar pajak penjualan ini lebih mahal dari tarif pajak yang sebenarnya.

(3) Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas tanah dan bangunan.

Struktur PBB cukup sederhana, dengan satu tarif tunggal yang tidak dapat diubah yaitu 0,5% dari nilai jual kena pajak.

(4) Bea Masuk

Peraturan perundangan dibidang bea masuk diarahkan untuk dapat memberikan dukungan bagi industri dalam negeri, tanpa mengurangi fungsinya untuk mobilisasi dana pembangunan. Sistem pemungutan bea masuk telah disederhanakan sehingga tidak menimbulkan beban ekonomis tambahan dan melancarkan arus barang.

(5) Cukai

Kebijakan dibidang cukai selain untuk meningkatkan penerimaan negara juga diarahkan kepada terciptanya kesempatan kerja. Cukai-cukai itu antara lain cukai tembakau, gula, bir dan alkohol.

(6) Pajak Ekspor

Kebijaksanaan dibidang pajak ekspor diarahkan selain untuk penerimaan negara juga ditujukan untuk perluasan kesempatan kerja melalui peningkatan produksi barang industri non migas. Beberapa jenis hasil hutan yaitu kayu gelondongan dan rotan olahan dikenakan pajak ekspor yang sangat tinggi untuk memperluas kesempatan kerja, dipihak lain untuk mendorong dan mempertahankan pasaran ekspor komoditi tertentu pajaknya diturunkan menjadi nol persen.

(7) Pajak-Pajak Daerah

Pajak-Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah Tingkat I dan Pemerintah Daerah Tingkat II terdiri dari pajak pusat yang diserahkan pada daerah berdasarkan ketentuan yang ada.

Akibat dari pembaharuan sistem perpajakan adalah adanya peningkatan penerimaan pajak oleh negara dan peningkatan jumlah wajib pajak. Penerimaan pajak pada tahun 1983/1984 sebesar Rp 2.986,9 milyar, pada tahun 1986/1987 meningkat menjadi Rp 7.659,5 milyar. Jumlah wajib pajak pada tahun 1983/1984 sebanyak 435.517 orang, pada tahun 1986/1987 meningkat menjadi 1.328.389 orang.

Landasan Teori

Secara umum penerimaan pemerintah dari sektor pajak dapat ditulis sebagai berikut:

$$R = t_r \times t_b \times j_w$$

R = penerimaan pemerintah dari pajak

t_r = tax rate (rata-rata tarif pajak)

t_b = tax base (dasar pajak, rata-rata objek pajak)

j_w = jumlah wajib pajak

Adanya deregulasi perpajakan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap rata-rata tarif pajak, dasar pajak maupun jumlah wajib pajak yang pada akhirnya berpengaruh terhadap penerimaan pajak oleh pemerintah.

Secara khusus, landasan teori dari model penelitian ini adalah sebagai berikut:

- (1) Penerimaan pajak penghasilan perorangan disumsikan dipengaruhi secara positif oleh pendapatan nasional bruto dan deregulasi perpajakan yang dilakukan pemerintah. Secara matematik dapat ditulis:

$$Tpi_t = f(GDPN_t, D84_t)$$

Tpi = Penerimaan pajak penghasilan perorangan

GDPN = Pendapatan domestik bruto

D84 = Deregulasi pajak penghasilan perorangan

- (2) Besar pajak penghasilan badan usaha yang diperoleh pemerintah diasumsikan dipengaruhi oleh pendapatan nasional bruto dan deregulasi pajak penghasilan badan

usaha. Secara matematik ditulis:

$$Tc p_t = f(GDPN_t, D84_t)$$

GDPN = Pendapatan domestik bruto

Tcp = Pajak penghasilan badan usaha

D84 = Deregulasi pajak penghasilan badan usaha

- (3) Pajak pertambahan nilai dipengaruhi oleh pendapatan nasional bruto dan deregulasi pajak pertambahan nilai.

Secara matematik ditulis:

$$Tva_t = f(GDPN_t, D85_t)$$

GDPN = Pendapatan domestik bruto

Tva = Pajak pertambahan nilai

D85 = Deregulasi pajak pertambahan nilai

- (4) Besarnya bea masuk yang diterima pemerintah ditaksir dengan regresi linier berganda dimana bea masuk dipengaruhi oleh impor barang konsumsi dan antara, pengeluaran defisit pemerintah tahun sebelumnya dan deregulasi bea masuk. Secara matematik ditulis:

$$Tid_t = f(Mcon_t, BD_{t-1}, Dumtid_t)$$

Tid = Bea masuk

Mcon = Impor barang konsumsi dan antara

BD = pengeluaran defisit pemerintah

Dumtid = Deregulasi bea impor barang konsumsi dan antara

- (5) Penerimaan pajak bumi dan bangunan merupakan fungsi dari pendapatan nasional bruto dan deregulasi pajak

bumi dan bangunan tahun 1986. Secara matematik ditulis:

$$Tlb_t = f(GDPN_t, D86_t)$$

GDPN = Pendapatan domestik bruto

Tlb = Pajak bumi dan bangunan

D86 = Deregulasi pajak bumi dan bangunan

- (6) Pajak ekspor diasumsikan dipengaruhi oleh pendapatan nasional bruto dan deregulasi ekspor komoditi primer yang berlaku sejak tahun 1980. Secara matematik dapat ditulis:

$$Texp_t = f(Xagrp_t, D80_{t-1})$$

Texp = Pajak ekspor

Xagrp = Ekspor komoditi primer

D80 = Deregulasi pajak ekspor komoditi primer tahun 1980

- (7) Pajak lainnya ditaksir dengan persamaan regresi linier dimana merupakan fungsi dari pendapatan nasional bruto dan deregulasi perpajakan yang berlaku sejak tahun 1986. Secara matematik ditulis:

$$Toth_t = f(Gdpn_t, D86)$$

Toth = Pajak lainnya

GDPN = Pendapatan domestik bruto

D86 = Deregulasi perpajakan yang berlaku sejak tahun 1986

- (8) Besarnya penerimaan pemerintah bukan pajak diasumsikan

dipengaruhi oleh pendapatan nasional bruto dan deregulasi perpajakan yang berlaku sejak tahun 1986.

Secara matematik ditulis:

$$Tntr_t = f(GDPN_t, D86_t)$$

Tntr = Penerimaan pemerintah bukan pajak

GDPN = Pendapatan domestik bruto

D86 = Deregulasi perpajakan yang berlaku sejak tahun
1986

Metode Penelitian

A. Data yang digunakan

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari Departemen Keuangan, Bappenas dan BPS. Periode observasi dari tahun 1971 sampai dengan tahun 1988. Data tersebut merupakan data runtut waktu tahunan. Untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah dirumuskan digunakan model regresi linier yang ditaksir dengan metode OLS.

B. Variabel yang digunakan

Variabel dummy (variabel boneka) digunakan untuk melihat pengaruh berbagai reformasi/deregulasi perpajakan. Masing-masing reformasi perpajakan digunakan satu dummy.

Variabel dibagi atas variabel endogen dan variabel eksogen. Variabel endogen terdiri atas semua penerimaan pajak diluar migas. Variabel eksogen terdiri atas GDP, variabel dummy, impor barang konsumsi dan antara dan ekspor komoditi pertanian. Spesifikasi variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

(1) Variabel endogen

T_{pi} = penerimaan pajak penghasilan perorangan

T_{cp} = penerimaan pajak penghasilan badan

T_{va} = penerimaan pajak pertambahan nilai

Tid = penerimaan bea masuk
Tlb = pajak bumi dan bangunan
Texp = penerimaan pajak ekspor
Toth = penerimaan pajak lainnya
Tntr = penerimaan non pajak

(2) Variabel eksogen

GDPN = Pendapatan Nasional Bruto
Mcon = impor barang konsumsi dan barang antara
Xagr = ekspor komoditi pertanian
D80 = deregulasi ekspor komoditi primer
D84 = deregulasi pajak penghasilan perorangan tahun
1984
D85 = deregulasi pajak pertambahan nilai tahun 1985
D86 = deregulasi Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1986
deregulasi tarif bea meterai

C. Model persamaan

Model secara lengkap terdiri dari 16 persamaan yang terdiri dari 8 persamaan dengan data (angka) asli dan 8 persamaan merupakan persamaan logaritmanya. Persamaan dengan logaritma digunakan untuk mengetahui elastisitas masing-masing variabel dependen dari persamaan tersebut. Persamaan-persamaannya adalah sebagai berikut:

(1) Pajak penghasilan perorangan

$$Tpi = a_0 + a_1 GDPN + a_2 D84$$

$$\ln T_{pi} = a'_0 + a'_1 \ln GDPN + a'_2 D84$$

(2) Pajak penghasilan badan usaha

$$T_{cp} = b_0 + b_1 GDPN + b_2 D84$$

$$\ln T_{cp} = b'_0 + b'_1 \ln GDPN + b'_2 D84$$

(3) Pajak pertambahan nilai

$$T_{va} = c_0 + c_1 GDPN + c_2 D85$$

$$\ln T_{va} = c'_0 + c'_1 \ln GDPN + c'_2 D85$$

(4) Bea masuk

$$T_{id} = d_0 + d_1 Mcon + d_3 D85$$

$$\ln T_{id} = d'_0 + d'_1 \ln Mcon + d'_3 D85$$

(5) Pajak bumi dan bangunan

$$T_{lb} = e_0 + e_1 GDPN + e_3 D86$$

$$\ln T_{lb} = e'_0 + e'_1 \ln GDPN + e'_3 D86$$

(6) Pajak ekspor

$$T_{exp} = f_0 + f_1 X_{agrp} + f_2 D80(-1)$$

$$\ln T_{exp} = f'_0 + f'_1 \ln X_{agrp} + f'_2 D80(-1)$$

(7) Pajak lainnya

$$T_{oth} = g_0 + g_1 GDPN + g_2 D86$$

$$\ln T_{oth} = g'_0 + g'_1 \ln GDPN + g'_2 D86$$

(8) Penerimaan bukan pajak

$$T_{ntr} = h_0 + h_1 GDPN + h_2 D86$$

$$\ln T_{ntr} = h'_0 + h'_1 \ln GDPN + h'_2 D86$$

Analisis, Hasil dan Pembahasan

Pajak penghasilan perorangan.

Dari perhitungan diperoleh hasil persamaan sebagai berikut (dalam satuan milyar rupiah):

$$T_{pi} = -116,074 + 0,0086 \text{ GDPN} - 41,945 \text{ D84}$$

(-1,122) (6,312) (-0,422) (t hitung)

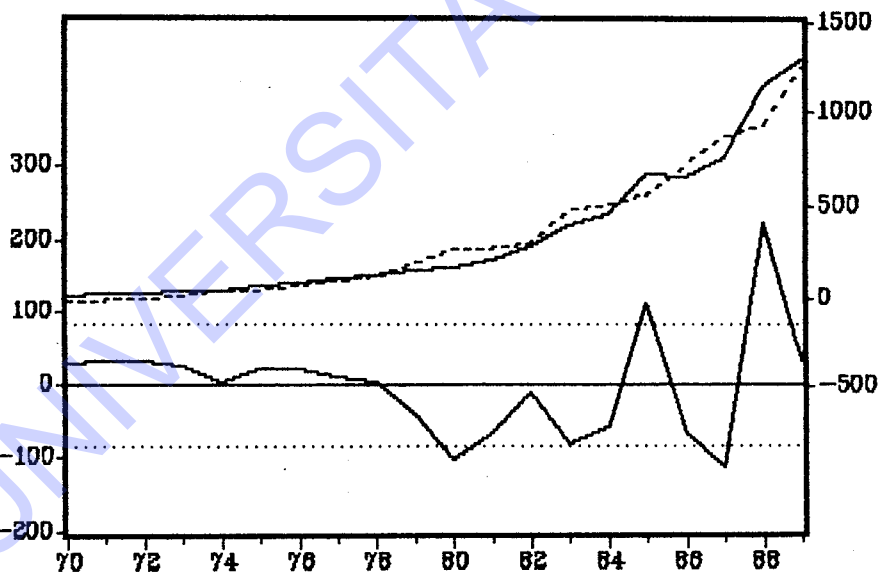
$$R^2 = 0,96$$

$$DW = 2,05$$

$$\rho = 0,687$$

$$t_{\text{tabel}} (\nu = 20, \alpha = 0,025) = 2,086$$

Gambar 1
Pajak Penghasilan Perorangan



— RESIDUAL — ACTUAL ---- FITTED

Deregulasi pajak penghasilan perorangan yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1984 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pemerintah ($t_{hitung} < 2,086$). Kenaikan pendapatan domestik bruto meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak penghasilan perorangan dengan elastisitas sebesar 0,995 seperti yang terlihat pada persamaan berikut:

$$LTpi = -192,914 + 0,995 GDPN + 0,369 D84$$

$$(-13,228) \quad (24,213) \quad (3,317)$$

$$R^2 = 0,989$$

$$DW = 1,493$$

Kenaikan pendapatan domestik bruto sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak penghasilan perorangan sebesar 0,995%. Dengan semakin efisiennya sistem perpajakan, dapat diharapkan untuk tahun-tahun berikutnya elastisitas ini akan semakin meningkat sehingga lebih besar dari satu (elastis).

Pajak penghasilan badan usaha.

Bagaimana bentuk hubungan antara pajak penghasilan badan usaha dengan pendapatan domestik bruto dan pembaharuan sistemnya ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$Tcp = -93,046 + 0,024 GDPN + -553,0249 D84$$

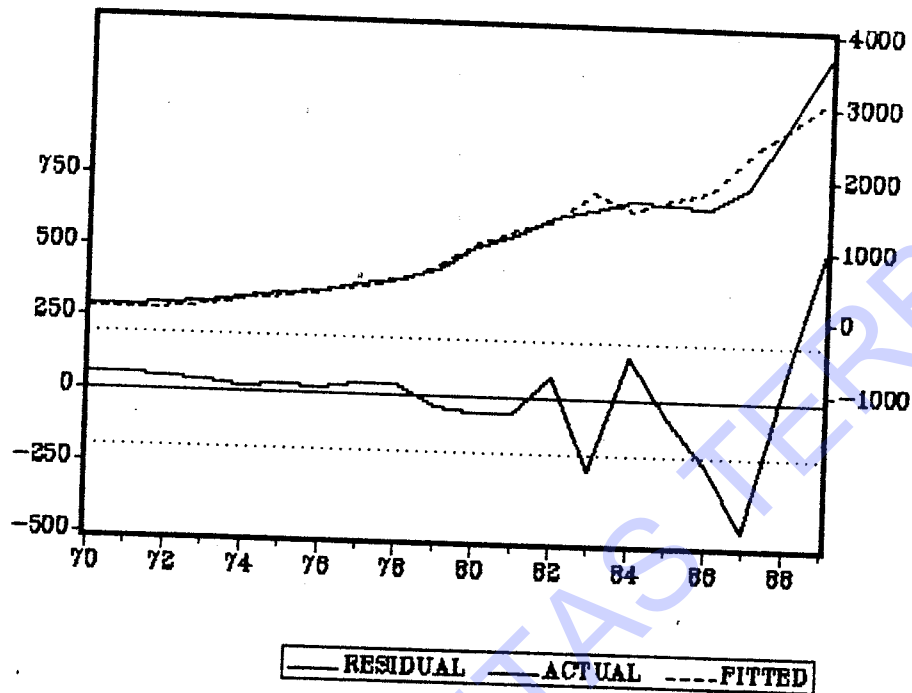
$$(-13,227) \quad (12,899) \quad (-2,808)$$

$$R^2 = 0,965$$

$$DW = 1,493$$

$$t_{\text{tabel}} (\nu = 20, \alpha = 0,025) = 2,086$$

Gambar 2
Pajak penghasilan badan usaha



Ternyata deregulasi perpajakan menggeser kebawah kurva penerimaan pajak penghasilan badan usaha oleh pemerintah sebesar 553,249. Secara signifikan pendapatan nasional dan deregulasi perpajakan tahun 1984 masing-masing berpengaruh terhadap penerimaan pajak badan usaha. Penurunan penerimaan pajak penghasilan badan usaha mungkin disebabkan karena turunnya prosentase pajak dari 20% menjadi kurang dari 20% setelah deregulasi.

Elastisitas pajak penghasilan badan usaha terhadap pendapatan domestik bruto adalah 1,174 (elastis) seperti yang ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$LTcp = -5,7 + 1,175 \text{ GDPN} - 0,346 \text{ D84}$$

$$(-20,67) \quad (41,63) \quad (-4,53)$$

$$R^2 = 0,99$$

$$DW = 1,37$$

Kenaikan pendapatan domestik bruto sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan negara dari pajak penghasilan badan usaha sebesar 1,17%.

Pajak pertambahan nilai.

Deregulasi perpajakan untuk pajak pertambahan nilai yang dilakukan pemerintah sejak tahun 1985 memberikan pengaruh yang nyata terhadap peningkatan penerimaan negara seperti yang ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$Tva = -1167,405 + 0,034 \text{ GDPN} + 1238,98 \text{ D85}$$

$$(0,476) \quad (2,444) \quad (3)$$

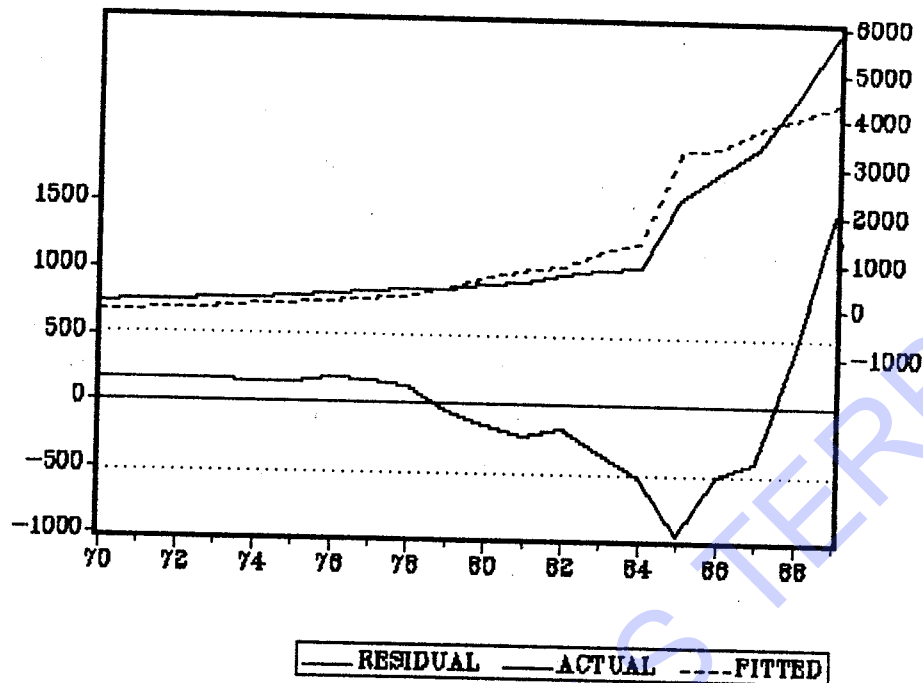
$$R^2 = 0,969$$

$$DW = 1,005$$

$$\rho = 0,9$$

$$t_{\text{tabel}} (v = 20, \alpha = 0,025) = 2,086$$

Gambar 3
Pajak pertambahan nilai



Deregulasi perpajakan tahun 1985 dan pendapatan domestik bruto berhasil meningkatkan penerimaan negara dari pajak pertambahan nilai. Akibat dari deregulasi perpajakan 1985 menggeser kurva pajak pertambahan nilai sebesar 1238,98.

Elastisitas pajak pertambahan nilai terhadap pendapatan domestik bruto sebesar 0,879 (inelastis) seperti yang ditunjukkan pada persamaan berikut:

$$LTva = -3,063 + 0,879 LGDPN + 0.975 D85$$

$$(-2,77) \quad (0,034) \quad (0,975)$$

$$R^2 = 0,993$$

$$DW = 1,53$$

$$\rho = 0,7$$

Kenaikan sebesar 1% pendapatan domestik bruto akan meningkatkan pendapatan pemerintah dari pajak pertambahan nilai kurang dari 1%.

Bea masuk.

Banyak faktor yang mempengaruhi besarnya penerimaan pemerintah dari bea masuk. Selain dari banyaknya barang konsumsi dan barang antara yang diimpor juga adanya kebijakan pemerintah mengenai besar bea masuk masing-masing jenis barang, kuota impor, kepentingan pemerintah untuk melindungi industri dalam negeri ataupun untuk penghematan devisa akan mempengaruhi besarnya penerimaan bea masuk. Bagaimana pengaruh impor barang konsumsi dan antara juga deregulasi perpajakan terhadap besarnya penerimaan bea masuk dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$Tid = 52,976 + 0,28 Mcon + 633,87 D85$$

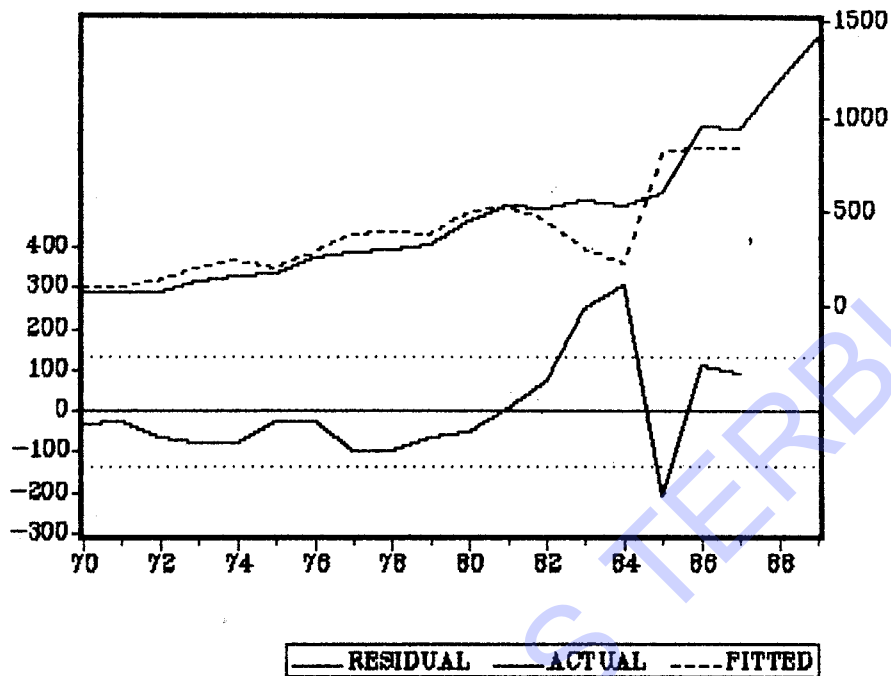
$$(0,741) \quad (3,882) \quad (7,143)$$

$$R^2 = 0,79$$

$$DW = 1,56$$

$$t_{\text{tabel}} (\nu = 18, \alpha = 0,025) = 2,101$$

Gambar 4
Bea masuk



Besar impor barang konsumsi dan antara juga deregulasi perpajakan berpengaruh secara nyata dan positif terhadap penerimaan negara dari bea masuk. Deregulasi perpajakan menggeser keatas kurva bea masuk sebesar 633,87.

Elastisitas bea masuk terhadap impor barang konsumsi dan antara sebesar 0,777 (inelastis) ditunjukkan oleh persamaan berikut:

$$LTid = 0,879 + 0,777 LMcon + 0,736 D85$$

$$(2,675) \quad (14,096) \quad (5,645)$$

$$R^2 = 0,95$$

$$DW = 1,289$$

Kenaikan 1% impor barang konsumsi dan antara meningkatkan penerimaan bea masuk sebesar 0,777%.

Pajak bumi dan bangunan.

Pajak bumi dan bangunan diharapkan akan meningkat setelah adanya deregulasi perpajakan, karena merupakan sumber pendapatan daerah untuk melaksanakan kegiatannya dalam pembangunan. Secara keseluruhan deregulasi perpajakan berhasil meningkatkan penerimaan pemerintah seperti yang terlihat pada persamaan berikut:

$$T1b = 16,25 + 0,0015 \text{ GDPN} + 142,724 \text{ D86}$$

(1,149) (4,467) (2,376)

$$R^2 = 0,87$$

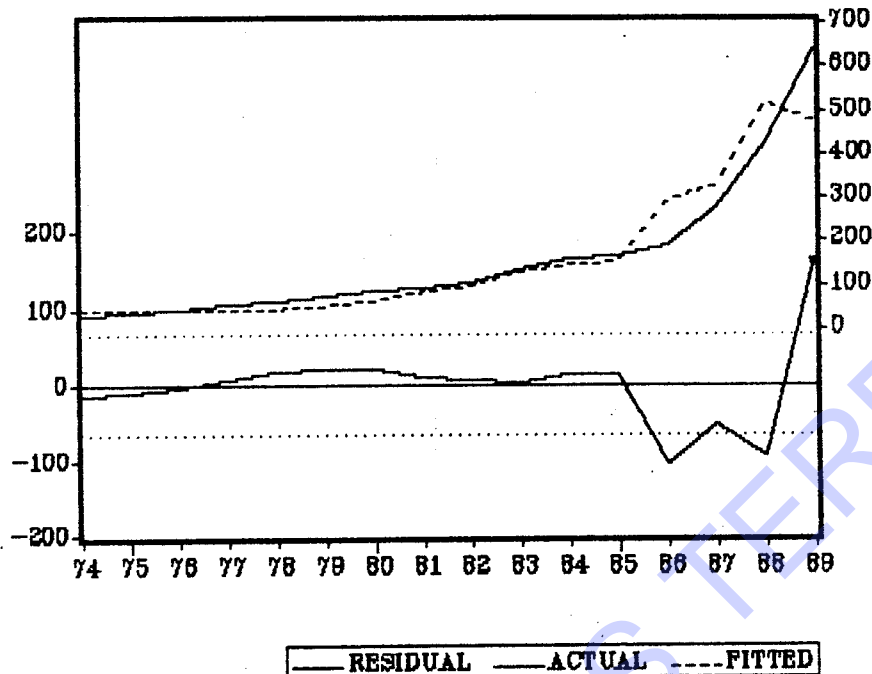
$$DW = 1,67$$

$$\rho = -1,33 \quad (\text{AR}(2))$$

$$t_{\text{tabel}} (v = 16, \alpha = 0,025) = 2,12$$

Akibat dari deregulasi perpajakan pajak bumi dan bangunan yang diterapkan sejak tahun 1986 menggeser keatas fungsi penerimaan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah sebanyak 142,724. Pendapatan nasional bruto juga berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan.

Gambar 5
Pajak bumi dan bangunan



Elastisitas pajak bumi dan bangunan sebesar 0,741 (inelastis) yang dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$LT1b = -3,457 + 0,741 \text{ GDPN} + 0,548 \text{ D86}$$

$$(-8,16) \quad (18,024) \quad (4,479)$$

$$R^2 = 0,964$$

$$DW = 1,277$$

$$\rho = -0,67 \text{ (AR(2))}$$

Penerimaan pajak bumi dan bangunan akan meningkat sebanyak 0,74% bila pendapatan domestik bruto meningkat sebanyak 1%.

Pajak ekspor.

Deregulasi ekspor komoditi primer yang dilaksanakan pemerintah yang dimulai tahun 1980 mengakibatkan menurunnya penerimaan pajak ekspor secara signifikan, meskipun demikian ekspor komoditi pertanian memberikan pengaruh positif secara signifikan. Hal ini wajar mengingat deregulasi ekspor komoditi primer bertujuan untuk meningkatkan ekspor dengan mempermudah perijinan dan dilain pihak ada larangan untuk ekspor kayu dan rotan yang belum diolah. Pengurangan penerimaan pajak ekspor akibat deregulasi tahun 1980 adalah seperti berikut:

$$\text{Texp} = 34,567 + 0,103 \text{ Xagrp} - 68,959 \text{ D80}$$

$$(0,69) \quad (3,77) \quad (-1,767)$$

$$R^2 = 0,79$$

$$\text{DW} = 1,56$$

$$\rho = 0,66$$

$$t_{\text{tabel}} (\nu = 19, \alpha = 0,05) = 1,729$$

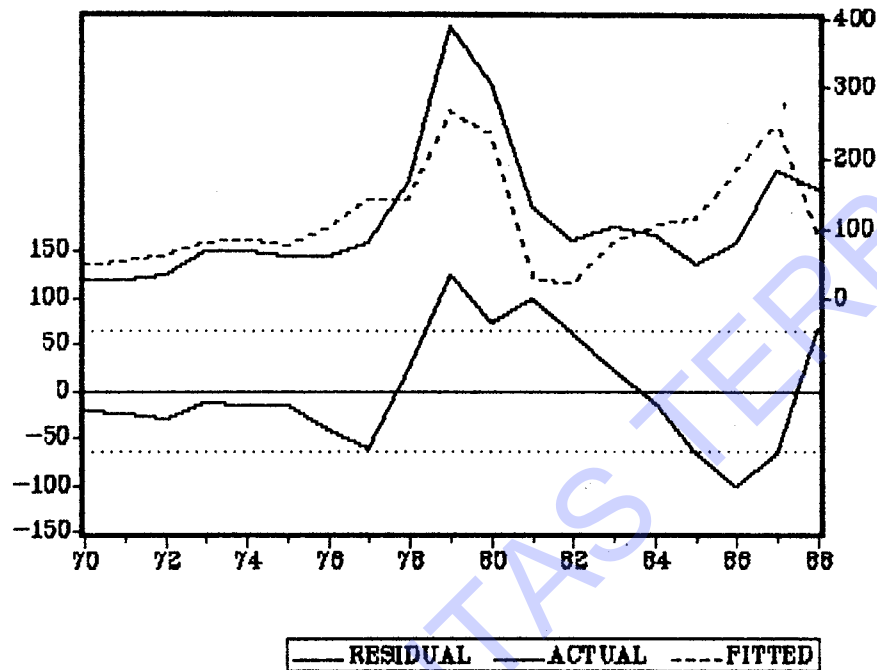
Deregulasi perpajakan tahun 1980 mengenai komoditi primer menggeser kebawah kurva penerimaan pajak ekspor sebesar 68,959.

Elastisitas penerimaan pajak ekspor terhadap ekspor komoditi primer sebesar 0,77 (inelastis). Kenaikan ekspor komoditi primer sebesar 1% akan meningkatkan penerimaan pajak ekspor sebesar 0,77%.

$$L\text{Texp} = -0,393 + 0,77 LXagr - 0,55 D80(-1)$$

$$(-0,264) \quad (3,5) \quad (-2,081)$$

Gambar 6
Pajak ekspor



Penerimaan pajak lainnya.

Penerimaan pajak lainnya meningkat secara signifikan dengan adanya deregulasi dalam tarif bea meterai yang efektif dilaksanakan mulai tahun 1985. Penerimaan pajak lainnya juga dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan domestik bruto seperti terlihat pada persamaan berikut:

$$\text{Toth} = -17,798 + 0,002 \text{ GDPN} + 65,28 \text{ D86}$$

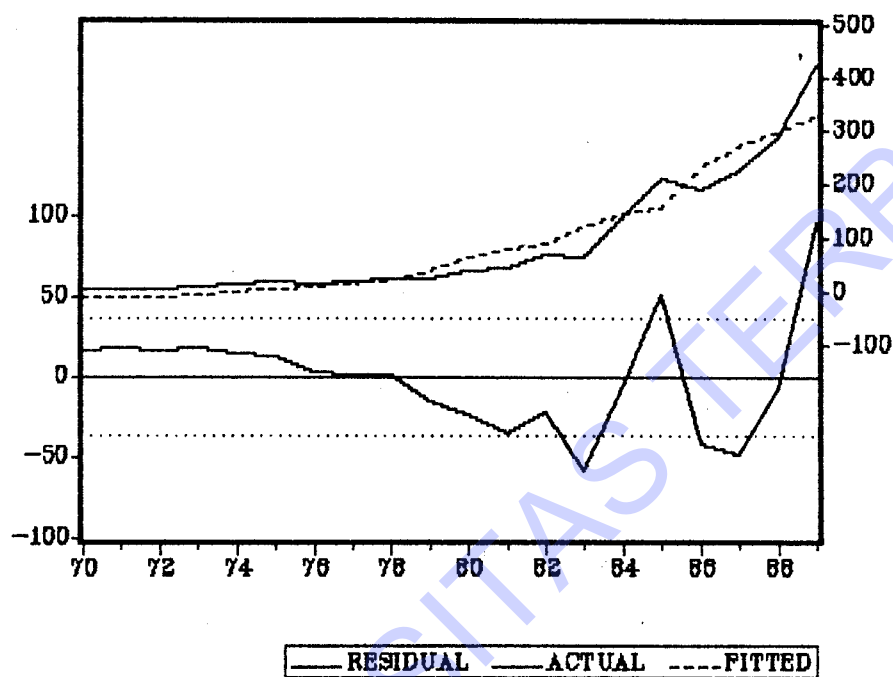
$$(-1,307) \quad (6,273) \quad (1,891)$$

$$R^2 = 0,954$$

$$DW = 1,24$$

$$t_{\text{tabel}} (v = 19, \alpha = 0,05) = 1,729$$

Gambar 7
Penerimaan pajak lainnya



Deregulasi perpajakan tahun 1986 menggeser keatas kurva penerimaan pajak lainnya sebesar 65,28.

Elastisitas penerimaan pajak lainnya terhadap pendapatan domestik bruto sebesar 0,89 (inelastis) dapat dilihat dari persamaan berikut:

$$L_{\text{Toth}} = -5,597 + 0,89 LGDPN + 0,725 D86$$

$$(-8,126) \quad (12,909) \quad (3,393)$$

$$R^2 = 0,954$$

$$DW = 1,405$$

Adanya kenaikan pendapatan domestik bruto sebesar 1% akan menyebabkan kenaikan penerimaan pajak lainnya sebesar 0,89%.

Penerimaan bukan pajak.

Penerimaan bukan pajak oleh pemerintah dari keuntungan BUMN, penjualan barang sitaan, kejaksaan, pemberian konsesi dan sebagainya dipengaruhi secara signifikan oleh pendapatan domestik bruto dan deregulasi perpajakan tahun 1986.

$$Tntr = -16,413 + 0,009 \text{ GDPN} + 777,233 \text{ D86}$$

$$(-0,192) \quad (6,002) \quad (3,588)$$

$$R^2 = 0,915$$

$$DW = 1,233$$

$$t_{\text{tabel}} (v = 20, \alpha = 0,025) = 2,086$$

Deregulasi perpajakan tahun 1986 berhasil meningkatkan penerimaan bukan pajak oleh pemerintah yaitu dengan bergesernya fungsi penerimaan bukan pajak keatas sebanyak 777,234.

Elastisitas penerimaan bukan pajak terhadap pendapatan domestik bruto dapat dilihat dari persamaan berikut:

$$LTntr = -5,758 + 1,108 \text{ GDPN} + 0,558 \text{ D86}$$

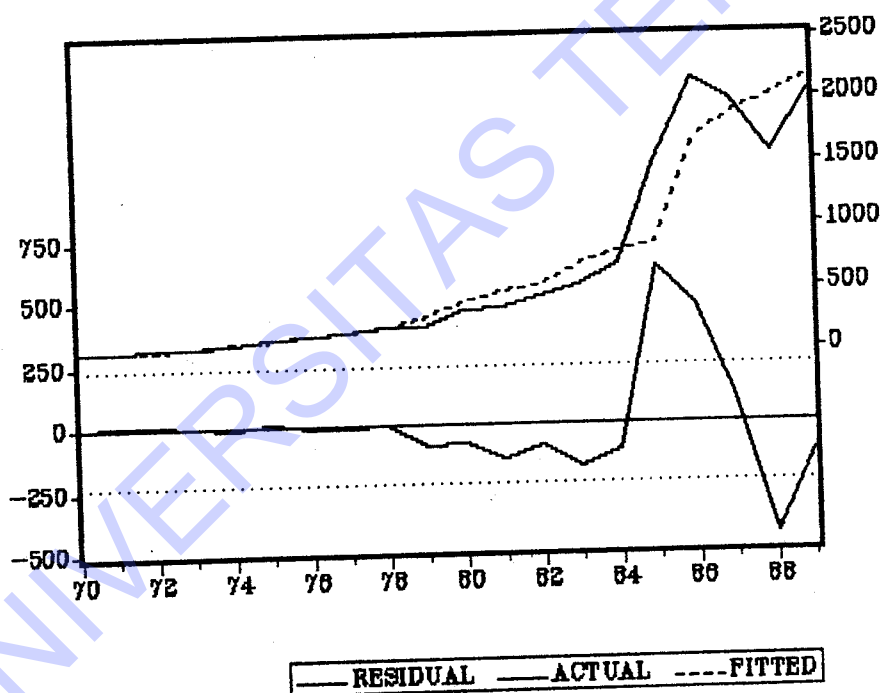
$$(-9,89) \quad (18,616) \quad (3,091)$$

$$R^2 = 0,974$$

$$DW = 1,36$$

Elastisitas penerimaan pemerintah bukan pajak sebesar 1,108 (elastis) yang berarti kenaikan 1% pendapatan domestik bruto akan meningkatkan penerimaan pemerintah sebesar 1,108%.

Gambar 8
Penerimaan bukan pajak



Kesimpulan

Reformasi perpajakan Indonesia dengan deregulasi berbagai sektor perpajakan memberi pengaruh yang bervariasi terhadap peningkatan penerimaan negara. Banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan deregulasi berbagai pajak karena menuntut adanya kesiapan mekanisme, aparat dan pengawasan yang mendukung deregulasi tersebut.

Pendapatan domestik bruto berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pemerintah dari berbagai sektor perpajakan. Kalau dilihat elastisitasnya ternyata yang elastis hanya pada penerimaan pajak penghasilan badan usaha. Hal ini mungkin disebabkan karena diterapkannya sistem pajak progresif. Penerimaan pemerintah bukan pajak juga elastis terhadap pendapatan domestik bruto.

Deregulasi pajak penghasilan perorangan tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap penerimaan pemerintah dari sektor ini. Penyebabnya adalah mungkin masih diperlukan waktu untuk menyesuaikan dari sistem lama peninggalan jaman Belanda ke sistem baru. Karena penelitian ini merupakan jangka pendek setelah pelaksanaan deregulasi jadi masih perlu waktu lebih lama lagi untuk melihat apakah deregulasi tersebut dapat meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak penghasilan perorangan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah turunnya

penerimaan pemerintah dari pajak ekspor akibat deregulasi pajak ekspor. Larangan ekspor kayu gelondongan dan rotan belum diolah menurunkan secara signifikan penerimaan pemerintah dari pajak ekspor.

Secara keseluruhan reformasi perpajakan di Indonesia cukup berhasil dalam meningkatkan penerimaan negara sebagai salah satu sumber dana untuk melaksanakan pembangunan nasional.

UNIVERSITAS TERBUKA

Lampiran I

Data yang digunakan.

| obs | TPI | TCP | TVA | TID | TLB | TEXP |
|------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1970 | 13.40000 | 39.30000 | 40.40000 | 70.70000 | 0.000000 | 25.00000 |
| 1971 | 17.40000 | 50.60000 | 46.40000 | 69.40000 | 0.000000 | 28.10000 |
| 1972 | 23.70000 | 64.20000 | 62.30000 | 73.20000 | 15.20000 | 32.70000 |
| 1973 | 34.40000 | 105.9000 | 105.3000 | 128.2000 | 19.50000 | 68.60000 |
| 1974 | 43.30000 | 182.5000 | 153.8000 | 160.6000 | 28.00000 | 70.30000 |
| 1975 | 61.70000 | 244.2000 | 191.7000 | 174.0000 | 34.60000 | 61.60000 |
| 1976 | 84.20000 | 297.7000 | 264.5000 | 257.4000 | 42.20000 | 61.70000 |
| 1977 | 104.6000 | 399.2000 | 318.0000 | 286.9000 | 52.50000 | 81.20000 |
| 1978 | 122.2000 | 495.0000 | 346.6000 | 295.3000 | 63.10000 | 166.2000 |
| 1979 | 148.1000 | 644.4000 | 329.4000 | 316.7000 | 71.40000 | 389.1000 |
| 1980 | 164.2000 | 948.0000 | 460.7000 | 448.0000 | 87.20000 | 305.0000 |
| 1981 | 207.2000 | 1159.900 | 533.9000 | 536.2000 | 94.50000 | 128.5000 |
| 1982 | 288.8000 | 1417.700 | 707.6000 | 521.9000 | 105.2000 | 82.50000 |
| 1983 | 398.9000 | 1533.400 | 830.6000 | 557.0000 | 132.4000 | 104.0000 |
| 1984 | 450.7000 | 1670.300 | 878.0000 | 530.1000 | 157.2000 | 91.00000 |
| 1985 | 674.7000 | 1638.300 | 2326.700 | 607.3000 | 167.5000 | 50.50000 |
| 1986 | 659.8000 | 1610.700 | 2900.100 | 960.1000 | 190.0000 | 78.80000 |
| 1987 | 757.1000 | 1906.300 | 3390.400 | 938.4000 | 275.1000 | 183.5000 |
| 1988 | 1158.700 | 2790.700 | 4505.300 | 1192.000 | 424.2000 | 155.6000 |
| 1989 | 1297.700 | 3649.900 | 5830.900 | 1421.200 | 638.5000 | 159.8000 |

| obs | TOTH | TNTR | GDPN | XAGRRP |
|------|----------|----------|----------|----------|
| 1970 | 4.600000 | 13.10000 | 3238.000 | 109.8286 |
| 1971 | 7.500000 | 27.50000 | 3672.000 | 159.0249 |
| 1972 | 6.900000 | 34.60000 | 4564.000 | 239.2060 |
| 1973 | 12.10000 | 49.80000 | 6753.400 | 387.5270 |
| 1974 | 17.00000 | 66.60000 | 10708.00 | 421.4740 |
| 1975 | 18.40000 | 110.4000 | 12642.80 | 352.3350 |
| 1976 | 13.80000 | 118.5000 | 15466.50 | 563.5700 |
| 1977 | 18.80000 | 143.6000 | 19010.70 | 889.8845 |
| 1978 | 24.70000 | 191.4000 | 22746.00 | 894.0019 |
| 1979 | 24.40000 | 187.3000 | 32025.40 | 1926.813 |
| 1980 | 40.70000 | 315.7000 | 45445.70 | 1645.034 |
| 1981 | 44.00000 | 336.4000 | 54027.00 | 915.2307 |
| 1982 | 68.50000 | 435.6000 | 59632.60 | 853.9594 |
| 1983 | 64.00000 | 519.0000 | 77676.30 | 1365.163 |
| 1984 | 138.4000 | 687.3000 | 89750.20 | 1540.962 |
| 1985 | 208.2000 | 1491.500 | 96850.30 | 1644.658 |
| 1986 | 190.4000 | 2157.300 | 102545.9 | 2183.302 |
| 1987 | 222.9000 | 1976.700 | 124538.9 | 2773.833 |
| 1988 | 292.1000 | 1568.800 | 139452.1 | 1403.345 |
| 1989 | 424.6000 | 2047.600 | 156151.1 | NA |

Lampiran II

Perhitungan pajak penghasilan perorangan.

LS // Dependent Variable is TPI
 Date: 2-06-1991 / Time: 12:42
 SMPL range: 1970 - 1989
 Number of observations: 20
 Convergence achieved after 14 iterations

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | -116.07421 | 103.49030 | -1.1215951 | 0.279 |
| GDPN | 0.0086286 | 0.0013669 | 6.3124765 | 0.000 |
| DB4 | -41.945432 | 99.325527 | -0.4223026 | 0.678 |
| AR(1) | 0.6870973 | 0.2316690 | 2.9658583 | 0.009 |
| R-squared | 0.960522 | Mean of dependent var | 335.5400 | |
| Adjusted R-squared | 0.953119 | S.D. of dependent var | 385.0484 | |
| S.E. of regression | 83.37031 | Sum of squared resid | 111209.7 | |
| Durbin-Watson stat | 2.056897 | F-statistic | 129.7619 | |
| Log likelihood | -114.6132 | | | |

LS // Dependent Variable is LTPI
 Date: 2-06-1991 / Time: 12:43
 SMPL range: 1970 - 1989
 Number of observations: 20

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | -5.3140240 | 0.4017362 | -13.227644 | 0.000 |
| LGDPN | 0.9954146 | 0.0411113 | 24.212687 | 0.000 |
| DB4 | 0.3691061 | 0.1112588 | 3.3175439 | 0.004 |
| R-squared | 0.988570 | Mean of dependent var | 5.049585 | |
| Adjusted R-squared | 0.987225 | S.D. of dependent var | 1.404423 | |
| S.E. of regression | 0.158738 | Sum of squared resid | 0.428361 | |
| Durbin-Watson stat | 1.493202 | F-statistic | 735.1323 | |
| Log likelihood | 10.05643 | | | |

Lampiran III

Perhitungan pajak penghasilan badan usaha.

LS // Dependent Variable is TCP
 Date: 2-06-1991 / Time: 12:45
 SMPL range: 1970 - 1989
 Number of observations: 20

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | -93.045648 | 71.746520 | -1.2968664 | 0.212 |
| GDPN | 0.0241688 | 0.0018738 | 12.898192 | 0.000 |
| DB4 | -553.02488 | 196.92587 | -2.8082896 | 0.012 |
| R-squared | 0.965307 | Mean of dependent var | 1042.410 | |
| Adjusted R-squared | 0.961225 | S.D. of dependent var | 992.2216 | |
| S.E. of regression | 195.3820 | Sum of squared resid | 648960.4 | |
| Durbin-Watson stat | 1.371404 | F-statistic | 236.5032 | |
| Log likelihood | -132.2527 | | | |

LS // Dependent Variable is LTCP
 Date: 2-06-1991 / Time: 12:46
 SMPL range: 1970 - 1989
 Number of observations: 20

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | -5.7008735 | 0.2757396 | -20.674843 | 0.000 |
| LGDPN | 1.1746197 | 0.0282175 | 41.627286 | 0.000 |
| DB4 | -0.3458970 | 0.0763647 | -4.5295399 | 0.000 |
| R-squared | 0.994473 | Mean of dependent var | 6.294067 | |
| Adjusted R-squared | 0.993823 | S.D. of dependent var | 1.386313 | |
| S.E. of regression | 0.108953 | Sum of squared resid | 0.201803 | |
| Durbin-Watson stat | 1.377729 | F-statistic | 1529.543 | |
| Log likelihood | 17.58320 | | | |

Lampiran IV

Hasil perhitungan pajak pertambahan nilai.

LS // Dependent Variable is TVA

Date: 2-06-1991 / Time: 12:48

SMPL range: 1970 - 1989

Number of observations: 20

Convergence achieved after 7 iterations

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | -1167.4050 | 2454.9758 | -0.4755261 | 0.641 |
| GDPN | 0.0335614 | 0.0137300 | 2.4443778 | 0.026 |
| D85 | 1238.9818 | 412.99958 | 2.9999590 | 0.008 |
| AR(1) | 0.8979210 | 0.1988056 | 4.5165785 | 0.000 |
| R-squared | 0.968629 | Mean of dependent var | 1211.130 | |
| Adjusted R-squared | 0.962747 | S.D. of dependent var | 1673.587 | |
| S.E. of regression | 323.0191 | Sum of squared resid | 1669461. | |
| Durbin-Watson stat | 1.005794 | F-statistic | 164.6759 | |
| Log likelihood | -141.7016 | | | |

LS // Dependent Variable is LTVA

Date: 2-06-1991 / Time: 12:49

SMPL range: 1970 - 1989

Number of observations: 20

Convergence achieved after 3 iterations

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | -3.0625978 | 1.1059051 | -2.7693134 | 0.014 |
| LGDPN | 0.8786732 | 0.1016739 | 8.6420702 | 0.000 |
| D85 | 0.9753906 | 0.1432980 | 6.8067289 | 0.000 |
| AR(1) | 0.6977647 | 0.1962018 | 3.5563627 | 0.003 |
| R-squared | 0.993409 | Mean of dependent var | 6.150690 | |
| Adjusted R-squared | 0.992174 | S.D. of dependent var | 1.497045 | |
| S.E. of regression | 0.132439 | Sum of squared resid | 0.280643 | |
| Durbin-Watson stat | 1.532282 | F-statistic | 803.8880 | |
| Log likelihood | 14.28526 | | | |

Lampiran V

Penghitungan bea masuk.

LS // Dependent Variable is TID
 Date: 2-06-1991 / Time: 12:52
 SMPL range: 1970 - 1989
 Number of observations: 18

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|
| C | 52.976097 | 71.444230 | 0.7415028 | 0.470 |
| MCON | 0.2800347 | 0.0721448 | 3.8815635 | 0.001 |
| DB5 | 633.87215 | 88.731331 | 7.1437241 | 0.000 |
| R-squared | 0.786000 | Mean of dependent var | 385.0778 | |
| Adjusted R-squared | 0.757467 | S.D. of dependent var | 274.1473 | |
| S.E. of regression | 135.0111 | Sum of squared resid | 273420.0 | |
| Durbin-Watson stat | 1.564347 | F-statistic | 27.54677 | |
| Log likelihood | -112.1964 | | | |

LS // Dependent Variable is LTID
 Date: 2-06-1991 / Time: 12:55
 SMPL range: 1970 - 1989
 Number of observations: 18

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|-----------|-------------|
| C | 0.8785404 | 0.3284428 | 2.6748653 | 0.017 |
| LMCONRP | 0.7771453 | 0.0551313 | 14.096252 | 0.000 |
| DB5 | 0.7359171 | 0.1303553 | 5.6454696 | 0.000 |
| R-squared | 0.952285 | Mean of dependent var | 5.661191 | |
| Adjusted R-squared | 0.945923 | S.D. of dependent var | 0.850272 | |
| S.E. of regression | 0.197726 | Sum of squared resid | 0.586434 | |
| Durbin-Watson stat | 1.287728 | F-statistic | 149.6833 | |
| Log likelihood | 5.275706 | | | |

Lampiran VI

Perhitungan pajak bumi dan bangunan.

LS // Dependent Variable is TLB
 Date: 2-06-1991 / Time: 12:57
 SMPL range: 1974 - 1989
 Number of observations: 16
 Convergence achieved after 14 iterations

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | 16.249576 | 14.142549 | 1.1489850 | 0.273 |
| GDPN | 0.0014601 | 0.0003268 | 4.4674229 | 0.001 |
| DB6 | 142.72402 | 60.049199 | 2.3767848 | 0.035 |
| AR(2) | -1.3307192 | 0.9818863 | -1.3552681 | 0.200 |
| R-squared | 0.870176 | Mean of dependent var | 160.2250 | |
| Adjusted R-squared | 0.837719 | S.D. of dependent var | 163.7380 | |
| S.E. of regression | 65.96031 | Sum of squared resid | 52209.14 | |
| Durbin-Watson stat | 1.671889 | F-statistic | 26.81084 | |
| Log likelihood | -87.42641 | | | |

LS // Dependent Variable is LTLB
 Date: 2-06-1991 / Time: 12:58
 SMPL range: 1974 - 1989
 Number of observations: 16
 Convergence achieved after 2 iterations

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | -3.4567564 | 0.4236428 | -8.1596017 | 0.000 |
| LGDPN | 0.7414366 | 0.0411350 | 18.024481 | 0.000 |
| DB6 | 0.5484096 | 0.1224533 | 4.4785209 | 0.001 |
| AR(2) | -0.6701183 | 0.4570747 | -1.4661022 | 0.168 |
| R-squared | 0.964722 | Mean of dependent var | 4.693925 | |
| Adjusted R-squared | 0.955903 | S.D. of dependent var | 0.880951 | |
| S.E. of regression | 0.184993 | Sum of squared resid | 0.410671 | |
| Durbin-Watson stat | 1.277103 | F-statistic | 109.3863 | |
| Log likelihood | 6.597400 | | | |

Lampiran VII

Perhitungan pajak ekspor.

LS // Dependent Variable is TEXP
 Date: 2-06-1991 / Time: 13:00
 SMPL range: 1970 - 1988
 Number of observations: 19
 Convergence achieved after 8 iterations

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | 34.567293 | 50.058504 | 0.6905379 | 0.500 |
| XAGRRP | 0.1025786 | 0.0272128 | 3.7695015 | 0.002 |
| D80(-1) | -68.959454 | 39.020869 | -1.7672454 | 0.098 |
| AR(1) | 0.6599642 | 0.2022737 | 3.2627290 | 0.005 |
| R-squared | 0.737843 | Mean of dependent var | 113.8895 | |
| Adjusted R-squared | 0.685412 | S.D. of dependent var | 94.57110 | |
| S.E. of regression | 53.04321 | Sum of squared resid | 42203.74 | |
| Durbin-Watson stat | 1.061082 | F-statistic | 14.07254 | |
| Log likelihood | -100.1652 | | | |

LS // Dependent Variable is LTEXP
 Date: 2-06-1991 / Time: 13:01
 SMPL range: 1970 - 1988
 Number of observations: 19
 Convergence achieved after 14 iterations

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | -0.3926799 | 1.4853034 | -0.2643769 | 0.795 |
| LXAGRRP | 0.7725785 | 0.2207300 | 3.5001066 | 0.003 |
| D80(-1) | -0.5495877 | 0.2640755 | -2.0811765 | 0.055 |
| AR(1) | 0.5812534 | 0.2336077 | 2.4881598 | 0.025 |
| R-squared | 0.817507 | Mean of dependent var | 4.470140 | |
| Adjusted R-squared | 0.781009 | S.D. of dependent var | 0.736326 | |
| S.E. of regression | 0.344574 | Sum of squared resid | 1.780973 | |
| Durbin-Watson stat | 1.339017 | F-statistic | 22.39838 | |
| Log likelihood | -4.470682 | | | |

Lampiran VIII

Perhitungan pajak lainnya.

LS // Dependent Variable is TOTH
 Date: 2-06-1991 / Time: 13:02
 SMPL range: 1970 - 1989
 Number of observations: 20

```
=====
```

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| C | -17.797547 | 13.612089 | -1.3074809 | 0.208 |
| GDPN | 0.0017985 | 0.0002867 | 6.2736539 | 0.000 |
| D86 | 65.280180 | 34.516263 | 1.8912876 | 0.076 |

```
=====
```

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.909115 | Mean of dependent var | 92.10000 |
| Adjusted R-squared | 0.898423 | S.D. of dependent var | 116.8505 |
| S.E. of regression | 37.24160 | Sum of squared resid | 23577.93 |
| Durbin-Watson stat | 1.241396 | F-statistic | 85.02510 |
| Log likelihood | -99.10211 | | |

```
=====
```

LS // Dependent Variable is LTOTH
 Date: 2-06-1991 / Time: 13:02
 SMPL range: 1970 - 1989
 Number of observations: 20

```
=====
```

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|----------|-------------|------------|------------|-------------|
| C | -5.5966856 | 0.6887272 | -8.1261283 | 0.000 |
| LGDPN | 0.8894797 | 0.0689028 | 12.909193 | 0.000 |
| D86 | 0.7247563 | 0.2136290 | 3.3925936 | 0.003 |

```
=====
```

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------------------|----------|
| R-squared | 0.954198 | Mean of dependent var | 3.710002 |
| Adjusted R-squared | 0.948810 | S.D. of dependent var | 1.361189 |
| S.E. of regression | 0.307973 | Sum of squared resid | 1.612407 |
| Durbin-Watson stat | 1.405048 | F-statistic | 177.0815 |
| Log likelihood | -3.198729 | | |

```
=====
```

Lampiran IX

Perhitungan penerimaan bukan pajak.

LS // Dependent Variable is TNTR
 Date: 2-06-1991 / Time: 13:03
 SMPL range: 1970 - 1989
 Number of observations: 20

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | -16.419289 | 85.418778 | -0.1922211 | 0.850 |
| GDPN | 0.0090056 | 0.0017990 | 5.0059831 | 0.000 |
| DB6 | 777.23368 | 216.59696 | 3.5883869 | 0.002 |
| R-squared | 0.915021 | Mean of dependent var | | 623.9350 |
| Adjusted R-squared | 0.905023 | S.D. of dependent var | | 758.3114 |
| S.E. of regression | 233.6990 | Sum of squared resid | | 928459.0 |
| Durbin-Watson stat | 1.232728 | F-statistic | | 91.52418 |
| Log likelihood | -135.8343 | | | |

LS // Dependent Variable is LTNTR
 Date: 2-06-1991 / Time: 13:04
 SMPL range: 1970 - 1989
 Number of observations: 20

| VARIABLE | COEFFICIENT | STD. ERROR | T-STAT. | 2-TAIL SIG. |
|--------------------|-------------|-----------------------|------------|-------------|
| C | -5.7577792 | 0.5822345 | -9.8891074 | 0.000 |
| LGDPN | 1.0843740 | 0.0582489 | 18.616218 | 0.000 |
| DB6 | 0.5582605 | 0.1805971 | 3.0911926 | 0.007 |
| R-squared | 0.974636 | Mean of dependent var | | 5.523041 |
| Adjusted R-squared | 0.971652 | S.D. of dependent var | | 1.546337 |
| S.E. of regression | 0.260354 | Sum of squared resid | | 1.152328 |
| Durbin-Watson stat | 1.361223 | F-statistic | | 326.6235 |
| Log likelihood | 0.160711 | | | |

DAFTAR PUSTAKA

- Dharmala Bhakti, 1984, "Undang-Undang Perpajakan", Jakarta.
- Gujarati, Damodar, 1978, "Basic Econometric", Mc Graw-Hill.
- Mardiasmo, 1987, "Perpajakan", Andi Offset, Yogyakarta.
- Musgrave, R.A., and Musgrave, P.B., 1980, "Public Finance in Theory and Practice", Mc Graw-Hill.
- Ploeg, Frederick van der, 1984, "Mathematical Methods in Economics", John Wiley & Sons.
- Sumitro, Rachmat, 1985, "Pajak dan Pembangunan", Nesco.
- Usman, Wan, 1988, "Ekonomi Indonesia", Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Universitas Terbuka.